

# **HEGEMONI PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024**

**Febriyani Puspita Pratiwi**  
Email : [fpuspitapратиwi@gmail.com](mailto:fpuspitapратиwi@gmail.com)

**Dra. Puji Astuti M.Si**  
Email : [pujiundip@gmail.com](mailto:pujiundip@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan bentuk partisipasi mutlak dalam proses demokrasi bangsa Indonesia. Dari pemaknaan tersebut diharapkan keberadaan mereka mampu melahirkan sensitifitas kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan perempuan. Kenyataannya perempuan seringkali menemui hambatan dalam berpolitik, seperti aturan partai yang menekan independensi perempuan dan adanya dominasi jumlah laki-laki yang menduduki kursi dewan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 ditengah keberadaan hegemoni hegemoni ganda yang berasal dari partai politik dan dominasi laki-laki di lembaga perwakilan ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, teknik pengambilan data juga dilakukan dengan kajian pustaka dan telaah dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi legislatif perempuan berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, namun dengan adanya system kolektif kolegial, perempuan belum mampu secara maksimal menyampaikan insiasi raperda secara mandiri. Dalam melaksanakan fungsi anggaran perempuan berperan secara aktif dalam proses perencanaan, pembahasan, penetapan serta monitoring dan evaluasi dalam penetapan APBD. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan peran perempuan cukup aktif dengan melaksanakan reses, melaksanakan kunjungan kerja bersama mitra OPD dan menurut mitra OPD peran anggota dewan cukup aktif dalam menyuarakan kebutuhan konstituennya.

Dengan demikian walaupun berada dibawah bayang-bayang hegemoni partai politik sebagai tempat mereka bernaung dan adanya dominasi laki-laki dari segi kuantitatif, anggota dewan membuktikan bahwa mereka mampu menyampaikan pendapat dan berusaha berperan secara aktif sebagai anggota dewan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

**Kata Kunci : Perempuan, Fungsi DPRD, Hegemoni, Peran**

# **The Political Parties Hegemony Toward the Performance of Women Council Members In DPRD Province of Central Java 2019-2024 Period**

**Febriyani Puspita Pratiwi**

**Email : [fpuspitapратиwi@gmail.com](mailto:fpuspitapратиwi@gmail.com)**

**Dra. Puji Astuti M.Si**

**Email : [pujiundip@gmail.com](mailto:pujiundip@gmail.com)**

*Department of Politic and Government*

*Faculty of Social and Political Science Diponegoro University*

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***Abstract***

The existence of women in legislative institutions is an absolute form of participation in the democratic process of the Indonesian nation. From this meaning, it is hoped that their existence will be able to give birth to policy sensitivity oriented to the interests of women. In fact women often encounter some obstacles in politics, such as political party rules that suppress women's independence and the dominance of the number of men who occupy seats in the council. The purpose of this study was to determine The Political Parties Hegemony Toward the Performance of Women Council Members In DPRD Province of Central Java 2019-2024 Period amidst of the existence of double hegemony originating from political parties and male domination in this representative institution.

This research used descriptive analytical method with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, and data collection techniques were also carried out with literature review and document review.

Based on the results of the study, the researcher found that the women played active role when they expressed their opinions in running out the legislative function. However, with the collegial collective system made the women did not able to optimally convey the draft local regulation independently. In carrying out the budget function, women played an active role in the planning processed, discussion, stipulation, monitoring and evaluation processed in the determination of the APBD. There were some activities to carry out the oversight function such as the role of women councillor was quite active by carrying out recess, The women councillor did a work visits with OPD partners and based on OPD partners the role of board members was quite active in voicing the needs of their constituents.

In the conclusion, despite the women councillor was under the shadow of the hegemony of political parties as a place for them to take shelter and the dominance of men in terms of quantitative, members of the council prove that they are able to greet opinions and try to play an active role as a member of the board in order to prosper the people of Central Java

**Key Words: *Women, DPRD function, Hegemony, Performance***

## A. PENDAHULUAN

Survei yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan sebelum terjadi pada pemilu tahun 2009, mengungkapkan masih adanya intimidasi dan diskriminasi berdasarkan gender kepada calon legislatif perempuan<sup>1</sup> sehingga keberadaan perempuan dalam dunia politik selalu berkaitan dengan adanya dominasi kekuasaan kepentingan yang dilakukan laki-laki. Praktik dominasi kekuasaan kepentingan oleh laki-laki dalam dunia politik nampaknya membentuk suatu pola hegemoni sebab menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex* menuliskan bahwa perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua atau makhluk sekunder<sup>2</sup>. Sehingga dengan keadaan seperti ini perempuan selalu dikaitkan sebagai makhluk yang lemah. Anggapan seperti ini memunculkan suatu konstruksi bahwa terdapat kecenderungan penguasaan dari pihak yang dianggap kuat yaitu lelaki terhadap pihak yang dianggap lemah yaitu perempuan. Penguasaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan mengindikasikan bahwa perempuan mengalami ketertindasan. Penindasan disini

erat kaitannya dengan peran yang dilakukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal ini yaitu dunia politik. Dalam dunia politik perempuan cenderung didorong untuk bisa menyesuaikan prinsip-prinsip maskulinitas.<sup>3</sup>

Istilah penguasaan pihak yang dianggap kuat terhadap pihak yang dianggap lemah bisa diartikan sebagai hegemoni. Menurut Eagleton, hegemoni adalah kemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis-basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi<sup>4</sup>. Pola hegemoni ini dapat terlihat dengan semakin menguatnya fungsi dan tugas DPRD Provinsi Jawa Tengah berdampak langsung terhadap besarnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna memenuhi aspirasi rakyat. Adanya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan semakin membuat DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang sangat strategis dalam sistem perpolitikan Indonesia.

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*.

<sup>2</sup> Simone de Beauvoir. 1988. *The Second Sex*. London : Pan books Ltd.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://lakilakibaru.or.id/hegemoni-maskulinitas-dan-arah-gerakan-feminisme> diakses pada 7 Oktober 2019

<sup>4</sup> Bagus Takwin. 2009. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta : Jalasutra.. Halaman 73

Didalam sistem perwakilan Indonesia, kemudian kita mengenal akan adanya fraksi. Munculnya fraksi tersebut bukan hal baru karena sistem politik di Indonesia telah mengenal istilah tersebut sejak 1950<sup>5</sup>. Ditinjau dari perkembangan fraksi di Indonesia, cenderung memperlihatkan terjadinya penguatan fraksi. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan kepada fraksi dari masa ke masa<sup>6</sup>. Penguatan tugas dan wewenang fraksi dapat dengan mudah dijadikan senjata dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang tidak pro-masyarakat. Salah satunya dalam proses penempatan anggota mereka ke dalam komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Muncul dugaan bahwa di DPRD Provinsi Jawa Tengah peran perempuan selalu didominasi oleh fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik. Dalam hal ini kepentingan fraksi lagi-lagi tidak jauh dari adanya dominasi laki-laki yang membawa peran lebih dan menjadi sentral decision dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam lembaga legislative misalnya penempatan komposisi yang tidak

seimbang didalam sebuah komisi mencerminkan rendahnya representasi perempuan didalamnya dan malah didominasi oleh laki-laki, padahal peran anggota legislative perempuan tidak terbatas didalam komisi yang hanya berkaitan dengan urusan domestic perempuan saja.

Penulis menduga walaupun perempuan sudah mampu duduk bersama laki-laki di lembaga legislatif namun adanya dugaan praktik hegemoni ganda yang dilakukan fraksi dan laki-laki saat penempatan perempuan dalam sebuah komisi, menyebabkan peran anggota legislative perempuan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota dewan. Latar belakang tersebut sekaligus menjadi penguat bahwa penelitian berjudul “Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024” penting dilakukan mengingat melalui pemerataan penempatan anggota legislative perempuan yang berkeadilan dan tanpa dominasi kepentingan patriarki dalam lembaga legislatif maka perempuan dapat menyuarakan berbagai kebijakan yang nantinya bisa mewujudkan hak-hak perempuan seutuhnya.

---

<sup>5</sup> Riris Katrina. 2008. *Penguatan Manajemen Fraksi: Meningkatkan Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja Fraksi di DPR-RI*. Jakarta. Hal. 48

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal 69.

Adanya latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hegemoni partai politik dalam penempatan anggota dewan perempuan didalam Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024?
2. Bagaimanakah pengaruh hegemoni parpol terhadap peran perempuan dalam menjalankan fungsinya di setiap Komisi sebagai legislator di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengetahui orientasi peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai legislator di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 ditengah keberadaan hegemoni partai politik dan dominasi laki-laki di lembaga perwakilan ini.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Peran Politik Perempuan**

Berbicara mengenai peran politik perempuan didalam lembaga legislatif tentu saja tidak bisa dipisahkan mengenai peran apa saja yang seharusnya dijalankan para anggota dewan tersebut. Maka dari itu perlu pemahaman mengenai pengertian peran, menurut konsep peran yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran<sup>7</sup>. Selanjutnya menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>8</sup> Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### **2. Hegemoni**

Menurut Eagleton, hegemoni adalah kemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis-basis pikiran

---

<sup>7</sup> Surjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 212.

<sup>8</sup> Abu Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu. Hal. 50.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

(kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi.<sup>10</sup>

Selanjutnya hegemoni, menurut Antonio Gramsci, bukanlah tipe dominasi represif yang mengandalkan cara-cara kekerasan. Hegemoni merupakan pemaksaan melalui persetujuan. Dengan cara yang halus dan kadang tidak disadari oleh individu. Hegemoni dijalankan guna mempertahankan dominasi atau kekuasaan satu pihak terhadap pihak yang lain (marjinal).<sup>11</sup> Hegemoni tidak memiliki arti yang sama dengan dominasi. Ia seringkali berupa penyelubungan kepentingan partikular dengan nilai universal, yang kemudian direproduksi terus-menerus melalui berbagai saluran. Dengan mekanisme ini, seringkali kelas marjinal tidak menyadari bahwa mereka sedang ada di bawah pengaruh hegemoni.

Praktik dominasi kekuasaan kepentingan oleh laki-laki dalam dunia

---

<sup>10</sup> Bagus Takwin. 2009. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta : Jalasutra. Hal. 73

<sup>11</sup> Haryotomo Wiryasono. *Hegemoni dalam Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Perspektif Filsafat Politik Antonio Gramsci*. Depok: Universitas Indonesia.

politik nampaknya membentuk suatu pola hegemoni sebab menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex* menuliskan bahwa perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua atau makhluk sekunder.<sup>12</sup> Sehingga dengan keadaan seperti ini perempuan selalu dikaitkan sebagai makhluk yang lemah. Selain itu muncul juga anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak mampu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ranah publik. Anggapan seperti ini memunculkan suatu konstruksi bahwa terdapat kecenderungan penguasaan dari pihak yang dianggap kuat yaitu lelaki terhadap pihak yang dianggap lemah yaitu perempuan. Penguasaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan mengindikasikan bahwa perempuan mengalami ketertindasan. Bahkan dalam melakukan tugas, wewenang, hak dan kewajiban perempuan yang terjun didalam dunia politik terbiasa mengikuti prinsip maskulinitas seperti saat menyampaikan gagasan atau kebijakan perempuan dibatasi atas dasar pemikiran patriarkhi. Penyelubungan kepentingan yang dilakukan laki-laki dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terus menerus sebagai nilai universal yang wajar diterima. Seperti ketika kebijakan yang seharusnya bisa berorientasi

---

<sup>12</sup> *Loc.cit.*, Simone de Beauvoir,

untuk kepentingan perempuan tetapi atas dasar kepentingan bersama keputusan yang dihasilkan tidak merepresentasikan perempuan sama sekali.

Dalam lembaga legislative misalnya penempatan komposisi yang tidak seimbang didalam sebuah komisi mencerminkan rendahnya representasi perempuan didalamnya dan malah didominasi oleh laki-laki, padahal peran anggota legislative perempuan tidak terbatas didalam komisi yang hanya berkaitan dengan urusan domestic perempuan saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun perempuan sudah mampu duduk bersama laki-laki di lembaga legislatif namun kenyataannya hegemoni yang dilakukan laki-laki masih terjadi didalam penempatan perempuan dalam sebuah komisi yang menyebabkan peran anggota legislatif perempuan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota dewan.

### **3. Gender**

Secara terminologis sex dan gender adalah dua hal yang berbeda. Sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Adanya perbedaan pada gender didasarkan pada alasan bahwa sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati, dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa gender dan kodrat merupakan dua hal yang berbeda. Gender merupakan hasil bentukan dari perilaku sosial dan budaya sedangkan kodrat merupakan suatu hal yang tidakbisa diubah karena ketetapan Tuhan (seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi) menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi kasus yang dimaksudkan untuk menggali penjelasan secara mendalam dan melakukan analisa mengenai Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024.

## **E. HASIL PENELITIAN**

### **Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024**

Pada periode tahun 2019-2024 perempuan yang duduk sebagai anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 23 orang dari total 120 anggota yang terpilih. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yaitu berjumlah 16 orang. Setelah terpilih sebagai anggota dewan, perempuan dihadapkan dengan masalah baru yaitu tunduk dan patuh pada aturan partai politik dan adanya dominasi dari jumlah laki-laki yang duduk di kursi dewan. Aturan partai politik didalam lembaga legislatif ini diwakili oleh aturan fraksi yang dapat membatasi gerakan mereka dan hal ini terjadi di lembaga legislatif tingkat nasional maupun tingkat lokal. Karena itu, wanita menghadapi dua permasalahan sebelum dan sesudah masuk menjadi anggota dewan.

### **Hegemoni Dalam Penempatan Anggota Dewan Perempuan di Komisi**

Hegemoni yang tercipta dalam penempatan anggota dewan perempuan adalah berasal dari hegemoni partai politik, yang dalam prosesnya juga terdapat relasi kuasa antara anggota perempuan suatu parpol dan petinggi parpol yang biasanya dipimpin oleh laki-laki. Adanya hegemoni parpol juga

menyebabkan adanya hegemoni patriarki yang berpengaruh terhadap orientasi peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya.

Bentuk-bentuk dari adanya hegemoni partai politik terhadap penempatan anggota dewan perempuan dalam sebuah komisi berbentuk sebagai berikut :

1. Fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai politik dan merupakan tempat bernaung anggota dewan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai dewan, sehingga apapun keinginan partai akan selalu diikuti oleh anggotanya sebagai bentuk loyalitas mereka
2. Dengan adanya fraksi, independensi anggota dewan sangat sulit dilakukan mengingat semua keputusan harus berdasarkan keputusan partai
3. Tujuan anggota dewan menjadi anggota fraksi adalah sebagai bentuk kontribusi langsung mereka, namun kenyataannya mereka harus patuh dan tunduk pada semua kehendak dan keputusan partai
4. Penentuan posisi seseorang dalam posisi strategis di lembaga legislative juga sudah ditentukan melalui mekanisme partai
5. Dalam penetapan anggota dewan masuk kedalam sebuah komisi sudah ada tawar



menawar dan negosiasi sebelumnya sehingga kesempatan anggota dewan dalam memilih hanya sebatas dalam tatanan formalitas semata

6. Sesuai pasal 7 UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pada point e menyebutkan bahwa fungsi partai politik salah satunya adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Atas dasar undang-undang tersebut sudah seharusnya penempatan anggota dewan perempuan dalam sebuah komisi harus dilakukan secara merata

### **Dimensi Hegemoni Partai Politik dan Dominasi Laki-Laki**

Menurut penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapat temuan bahwa anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah mengalami hegemoni ganda yaitu hegemoni yang disebabkan oleh partai politik dan hegemoni yang disebabkan oleh anggota dewan laki-laki, walaupun hal ini tidak begitu nampak namun praktik hegemoni tersebut itu ada. Penulis mengklasifikasikan dimensi hegemoni yaitu dalam bentuk nyata dan tidak nyata.

Berikut merupakan bentuk Hegemoni Nyata di lembaga legislatif ini :

1. Secara kuantitas anggota dewan sudah didominasi oleh anggota dewan laki-laki, hal ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis yang jarang mengangkat kesejahteraan perempuan dan terjadi ketimpangan kesejahteraan yang dirasakan oleh perempuan ketimbang laki-laki
2. Pembagian anggota dewan perempuan di komisi berdasarkan keputusan partai, pemberian kesempatan perempuan untuk memilih komisi yang diinginkan hanya sebatas formalitas
3. Posisi strategis di DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya ditempati oleh laki-laki, dapat terlihat dari komposisi pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak ada anggota dewan perempuan di dalamnya
4. Tujuan anggota dewan menjadi anggota fraksi adalah sebagai bentuk kontribusi langsung mereka, namun kenyataannya mereka harus patuh dan tunduk pada semua kehendak dan keputusan partai yang sudah tertuang dalam aturan tata tertib dan AD/ART masing-masing fraksi

Selanjutnya adalah bentuk dari adanya Hegemoni Tidak Nyata yang dialami anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Bentuk paksaan melalui persetujuan dengan cara halus dan tidak disadari individu, hal ini terlihat dari adanya keputusan partai dalam penempatan anggota dewan perempuan
- b. Kader PDIP di doktrin bahwa mereka adalah petugas partai jadi tidak ada independensi sehingga apa yang menjadi keinginan partai harus diikuti.
- c. Dijalankan untuk mempertahankan dominasi terhadap pihak lain, dengan adanya dorongan dari teman fraksi untuk menempati komisi tertentu, hal ini terjadi pada Ibu Sri Marnyuni anggota komisi B tujuannya adalah melenggangkan kekuasaan fraksi, karena anggota bersangkutan menjabat sebagai wakil ketua komisi B.
- d. Adanya bercandaan yang menyudutkan anggota dewan perempuan di dalam rapat atau di dalam forum di DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentu hal semacam ini tidak pantas dilakukan oleh siapapun karena bercandaan yang menyangkut isu gender adalah hal yang tabu

- e. Menurut ketua fraksi PDIP Bapak Bambang, anggota dewan perempuan diharapkan tidak apolitis dan harus selalu aktif dimulai dari tingkatan partai agar saat menjabat menjadi anggota dewan bisa aktif juga, adanya anggapan ini mengindikasikan perempuan dituntut untuk bisa mengikuti budaya maskulinitas, sebab perempuan harus membagi peran antara karir politik dan keluarga, jadi tidak mudah bagi perempuan untuk selalu aktif di ruang publik dengan beban ganda ini

Temuan diatas sesuai penjelasan Egelton bahwa hegemoni adalah pemenangan pemikiran kelas yang berkuasa yang berasal dari Partai politik/laki-laki lewat penguasaan basis-basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi. Namun hegemoni juga dapat ditekan keberadaanya apabila perempuan berdaya, berikut adalah faktor penghambat munculnya hegemoni yang diterima oleh anggota dewan perempuan di lembag legislatif :

1. Adanya dukungan dari sesama perempuan.
2. Munculnya kesadaran individu.
3. Media sosial sebagai media penghubung antara dewan dengan masyarakat
4. Loyalitas terhadap partai politik.

Selanjutnya adalah Pengaruh Hegemoni Terhadap Kinerja Legislator Perempuan dalam Menjalankan Fungsi, yaitu sebagai berikut :

### **Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Terkait proses panjang dalam pembuatan suatu Raperda tentunya penting sekali adanya peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Setelah diketahui bahwa peran anggota dewan perempuan disini sudah cukup baik namun mereka dirasa masih menemui hambatan dalam melaksanakan fungsinya, hal ini tidak bisa dipisahkan mengenai kuantitas perempuan yang sangat berpengaruh terhadap proses menjalankan fungsi legislasi, sebab dalam mengutarakan suatu usulan atau pendapat yang berkaitan kebutuhan perempuan bisa diraih apabila argument yang mendukung banyak dari sisi perempuan itu sendiri. Dalam proses mendukung peningkatan peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi agar berjalan maksimal, diperlukan peran anggota dewan laki-laki sebagai *key*

*person* yang mendorong dan memberikan *support* pada anggota dewan perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan Raperda yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan.

### **Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Tahapan akhir dari adanya peran perempuan dalam menjalankan fungsi anggaran adalah tercapainya anggaran responsive gender dalam setiap perencanaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, karena anggota dewan perempuanlah yang memiliki akses langsung sebagai lembaga perwakilan untuk bisa mewakili kesejahteraan perempuan untuk menghilangkan ketidakadilan gender dan perlindungan anak di Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun

2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008;

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan mengindikasikan bahwa peran yang dilaksanakn anggota dewan perempuan tidak terbatas hanya dengan duduk dan melakukan perencanaan tetapi lebih dari itu anggota dewan ikut berperan langsung dengan turun ke masyarakat. Selain itu menurut hasil wawancara diatas peran anggota dewan disesuaikan dengan bidang komisi serta disesuaikan tupoksinya. Kegiatan pengawasan tersebut berupa pendampingan kunjungan lapangan bersama OPD untuk monitoring dan evaluasi kegiatan, melaksanakan pengawasan anggaran dan perda dan melakukan *checks and balance* terhadap kegiatan gubernur Jawa Tengah agar melakukan visi misi, kewajiban dan tugasnya agar senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

### **Kinerja Legislator Perempuan dalam Menjalankan Tugas Bersama Mitra OPD**

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan, anggota dewan laki-laki maupun perempuan bernaung didalam sebuah komisi. Sebagai anggota komisi tentu saja dalam melaksanakan peranya bekerjasama dengan organisasi perngkat

daerah sebagai mitra untuk saling membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah

Secara umum walaupun dalam penempatan anggota dewan didalam komisi anggota dewan perempuan terhegemoni oleh partai politik namun dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan baik bahkan dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah bahwa anggota dewan perempuan dapat menjalankan ketiga fungsi dengan baik walaupun belum maksimal sepenuhnya. Dapat dijelaskan bahwa variable terlaksanya orientasi peran perempuan dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya keterlibatan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran
2. Adanya komposisi jumlah yang merata pada pembagian anggota dewan perempuan dalam sebuah komisi sehingga dalam upaya menyatakan pendapat suara perempuan menjadi lebih kuat dan bisa lebih mengakomodir kesejahteraan perempuan di Jawa Tengah

3. Tidak adanya diskriminasi dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan perempuan
4. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara anggota dewan perempuan dengan organisasi perangkat daerah mitra kerja serta adanya *check and balance* yang baik antara anggota dewan dengan gubernur

## **F. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 dapat disimpulkan bahwa anggota dewan perempuan mengalami hegemoni ganda. Hegemoni ganda tercipta pada saat penempatan anggota dewan perempuan ke dalam sebuah komisi yang berasal dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik. Selanjutnya hegemoni parpol juga menyebabkan adanya relasi kuasa antara anggota perempuan dan anggota dewan laki-laki yang berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya.

Adanya hegemoni partai politik dan dominasi laki-laki dalam menjalankan kinerja sebagai anggota dewan menyebabkan anggota dewan perempuan

mendapatkan hambatan untuk berada di posisi strategis di DPRD Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam menentukan komisi mana yang sesuai latar belakang para anggota dewan perempuan, sehingga mereka ditempatkan di komisi tanpa didasari oleh latar belakang profesi sebelumnya atau latar belakang pendidikan mereka. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan tiga fungsi dewan yaitu fungsi legislative, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Perempuan selalu mengikuti apapun keputusan yang dibuat oleh laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan. Kenyataannya meskipun anggota dewan perempuan berada di bawah bayang-bayang hegemoni partai politik dan dominasi laki-laki namun anggota dewan perempuan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pelaksanaan ketiga fungsi dewan tentunya tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak salah satunya Organisasi Perangkat daerah yang mendukung kinerja anggota dewan dan melakukan *checks and balance* agar semua program legislasi, anggaran dan pengawasan bisa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka mengejar kesempatan yang ada untuk berpartisipasi ditengah adanya hegemoni partai politik

yang membatasi ruang gerak mereka dan besarnya dominasi laki-laki di lembaga legislative.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni sebagai anggota dewan perempuan yang bekerja secara kolektif kolegial, anggota dewan perempuan diharapkan mampu menyampaikan gagasan dan pendapat secara mandiri dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dewan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan fraksi mereka bernaung yang mana merupakan perpanjangan tangan partai politik pengusung mereka. Selain itu perlu adanya *gender responsibility* bagi anggota dewan laki-laki dalam melaksanakan tugas bersama anggota dewan perempuan, sebab dalam konteks hegemoni dan dominasi yang sering terlewatkan adalah *gap* antara keinginan, kepercayaan dan kesempatan yang ada antara anggota dewan laki-laki dan anggota dewan perempuan dalam terjun di dunia politik.

### Daftar Pustaka

#### Sumber Buku

- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu. Hal. 50.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 145
- Bashin, Kamla. 1993. *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta : Benteng. Hal. 3
- Danial, Endang dan Nanan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Hal. 71
- de Beauvoir, Simone. 1988. *The Second Sex*. London : Pan books Ltd.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta:Gramedia
- Hastuti, Kurniawati. 2004. *Belajar dari kemenangan Perempuan Australia*. Jakarta:Kompas. Hal. 36
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 4.
- Katrina, Riris. 2008. *Penguatan Manajemen Fraksi: Meningkatkan Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja Fraksi di DPR-RI*. Jakarta. Hal. 48
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius. Hal 88
- Nasution, Saddat. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito. Hal. 32
- Nugroho ,Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 8
- Soekanto, Surjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 212.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Takwin, Bagus. 2009. Akar-Akar Ideologi. Yogyakarta : Jalasutra. Hal. 73

Umar, Nassarudin. 2014. Ketika Fikih Membela Perempuan. Elex Media Komputindo.

Weber dalam Tom Campbell. 1993. *Tujuh Teori Sosial*. Jakarta: Kanisius. Hal 7.

### **Sumber Jurnal, Skripsi dan Thesis**

Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. *E-Jurnal Katalogis*. Volume 3 Nomor 12. Hal.132-141

Fitriani, Annisa. 2015. *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. Jurnal TAPIS Vol.11 No. 2

Habermas, Jurgen. 1996. Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib. *Three Normative Models of Democracy Journal*. New Jersey: Princeton University Press

Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*.

Malaiha Dewi, Siti. 2007. *Peran Politisi Perempuan di DPRD : Studi Peran Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Kudus Periode 2004 – 2009*. Thesis. S2 Sosiologi UGM.

Nugroho, Hastanty. 2009. Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Politik Arendt, Hannah. *Makalah 4th*

*International Conference of Indonesia Studies* Bali 9-11 February.

Ratnawati. 2004. Potret Kuota Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Maret, Vol 7, No. 3, hal 297-298

Wiryasono, Haryotomo. *Hegemoni dalam Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Perspektif Filsafat Politik Antonio Gramsci*. Depok:Universitas Indonesia.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD pada bagian kedua pasal 65 ayat 1

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3

Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

### **Sumber Internet**

<https://lakilakibaru.or.id/hegemoni-maskulinitas-dan-arah-gerakan-feminisme>> diakses pada 7 Oktober 2019

<https://dprd.jatengprov.go.id/anggota-dprd-prov-jateng-terpilih-periode-2019-2024/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2019

<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/8277> diakses pada 5 Desember 2019

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pe-ngertian-kolektif-dan-contohnya/> diakses 8 April 2020